

# **FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PEMUKIMAN ILEGAL DI PALESTINA**

Cici Malinda Sari

[Cicimalinda04@gmail.com](mailto:Cicimalinda04@gmail.com)

Pembimbing: Saiman Pakpahan S.IP. M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. Soebraras KM. 12,5 Simpang Baru

Pekanbaru 2829-Telp/Fak. 0761-63277

## ***Abstract***

*This study talks about the issue of illegal settlements in the Palestinian territories. The illegal settlements built by Israel in the Palestinian territories have sparked opposition from various countries and violated international law because it is located on the streets or areas that are not part of Israel but the Palestinian territories. The UN Security Council made a resolution on the issue of illegal settlements, in the implementation there are several obstacles that cause the failure of peace in the creation of Palestine.*

*Various kinds of peace efforts have been made to create peace on the earth of Palestine. All peace talks and agreements have been signed, but the deal has run aground. All agreements and resolutions are still being violated by Israel, the offense was caused by some principal issues between the two sides. But the Israeli side always wins in the wind in various situations and conditions, so Israel is always on the side who always benefit, while the Palestinians are always on the side of the disadvantaged. Israel has a power that is strong enough so that superpowers like the US even on Israel.*

*The failure or stalled negotiations of agreement and peace are the result of many inhibiting factors even though the UN Security Council has sought to make a resolution for the creation of peace or the ever-initiated solution of a two-state solution. Whether the barriers from within and from outside. Implementation of the Resolution can not be done considering the number of cases that occur or the complicated problems that occur after the issuance of Resolution concerning illegal settlements in Palestine. Although initially the United States as an ally of Israel voted abstained at this resolution, it only sparked enormous anger for Israel and planned to add to the construction of illegal settlements as a real action rejecting the UN Security Council's Resolution on December 23, 2016. The dualism side of the US stance also became a key factor in the impediments to the implementation of UN Security Council resolutions. Where the attitude is inversely proportional shown during the reign of Barack Obama and Donald J. Trump.*

*Keywords: Implementation, Resolution, Illegal Settlements, UN Security Council.*

## PENDAHULUAN

Konflik antara Palestina dan Israel terjadi setelah Deklarasi Balfour, dimana bangsa Yahudi pun berupaya untuk mendirikan suatu negara dengan melakukan diplomasi pada 2 November 1917 melalui Deklarasi Balfour.<sup>1</sup> Deklarasi Balfour berisikan persetujuan atas gagasan pendirian negara baru oleh bangsa Yahudi di Palestina. Deklarasi ini berlangsung pada rapat Kabinet Inggris tanggal 31 Oktober 1917, yang menyatakan bahwa pemerintah Inggris mendukung rencana Israel untuk mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina, dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan hak-hak dari komunitas-komunitas Palestina.

Israel terus berusaha untuk memperbesar wilayah kekuasaannya. Berbagai cara dihalalkan untuk mewujudkan ambisinya, mulai dari menindas penduduk Palestina sampai pada aneksasi negara-negara tetangganya. Hal tersebut dimulai sejak awal berdirinya negara ini dengan melakukan perang dengan Libanon, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya, untuk memperebutkan Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pada peperangan ini, Israel berhasil memenangkan peperangan dan merebut + 70% dari luas total wilayah mandat PBB.<sup>2</sup>

Resolusi yang dikeluarkan dewan keamanan PBB terhadap

penyelesaian sengketa pemukiman illegal di wilayah israel ini diusulkan oleh Mesir, Malaysia, Selandia Baru, Senegal dan Venezuela. Kemudian banyak yang mendukung resolusi DK PBB, salah satunya Indonesia. Amerika Serikat juga membuat keputusan langka dengan tidak menuruti Israel untuk memveto resolusi DK PBB soal penghentian seluruh proyek permukiman Israel di tanah Palestina. Amerika Serikat bersifat abstain karena menganggap masalah permukiman Illegal ini sudah jauh lebih buruk, dan itu mengancam solusi dua negara tersebut. Resolusi ini menuntut Israel:

***“Segera dan sepenuhnya menghentikan aktivitas permukiman di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Jerusalem Timur karena permukiman tersebut tidak memiliki dasar hukum dan merupakan pelanggaran terang-terangan atas hukum internasional.”<sup>3</sup>***

4 dari 5 negara permanen Dewan Keamanan PBB dan 10 anggota non permanen mendukung resolusi tersebut. Mereka adalah China, Perancis, Rusia, Inggris, Angola, Mesir, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Senegal, Spanyol, Ukraina, Uruguay dan Venezuela.

Maka dari itu, peneliti ingin meneliti dalam hal faktor yang menjadi penghambat dalam pengambilan Resolusi Konflik ini. Jika ditinjau kasus resolusi ini menarik untuk diteliti lagi yaitu mengenai Resolusi DK PBB yang telah disahkan pada 23 desember 2016 lalu. Mengingat banyaknya dukungan dalam anggota PBB untuk mempercepat proses resolusi konflik ini dan salah satu

---

<sup>1</sup> Deklarasi Balfour adalah surat yang ditulis oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur James Balfour, kepada pemimpin komunitas Yahudi Inggris, Lord Rothschild, untuk dikirimkan kepada Federasi Zionis pada tanggal 2 November 1917.

<sup>2</sup> Sarjoni. (2010). *Analisis Konflik Israel-Palestina: Sebuah Penjelajahan Dimensi Politik dan Teologis*. Pada <http://sarjoni.wordpress.com/2010/10/07/analisis-konflik-israel-palestina-sebuahpenjelajahan-dimensi-politik-dan-teologis/>, diakses pada 12 April 2017

negara pemegang hak veto PBB yaitu Amerika bersifat abstain terhadap resolusi yang dikeluarkan DK PBB ini. Meninjau kembali bahwa ini baru kali pertama Amerika bersifat abstain dalam kasus Israel-Palestina.

Mungkin dikarenakan saat itu adalah masa akhir kepemimpinan Obama sebelum Trump naik menjadi Presiden Amerika Serikat saat ini. Terkait dengan hambatan yang akan diteliti yaitu mengenai Israel yang menolak Resolusi DK PBB, dan tetap melanjutkan rencana pemukiman ilegal Israel.

## PEMBAHASAN

### Pemukiman Ilegal Israel di Palestina

Permukiman Yahudi dibangun oleh Israel di tanah yang diduduki dalam perang Timur Tengah pada 1967. Tanah ini termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan. Menurut kelompok anti-permukiman Israel Peace Now,<sup>4</sup> terdapat 131 permukiman di Tepi Barat terdiri dari 385 pemukim Yahudi dan 97 bangunan atau permukiman yang dibangun tanpa izin resmi. Kelompok ini mengatakan terdapat 12 permukiman di Yerusalem Timur, dengan sekitar 200.000 pemukim. Israel juga telah membangun permukiman di Jalur Gaza, yang dicaplok Israel dari Mesir pada perang 1967, namun dihancurkan saat menarik diri dari kawasan itu pada 2005. Israel juga membangun permukiman di Semenanjung Sinai, yang direbut dari Mesir pada 1967 dan dihancurkan pada 1982 sebagai bagian dari perjanjian damai dengan Kairo. Selain itu juga ada puluhan permukiman di dataran tinggi Golan yang diduduki, dan dikuasai dari Suriah pada perang 1967. Permukiman ini menduduki

---

<sup>25</sup> [www.peacenow.org](http://www.peacenow.org) di Akses Tanggal 31 Januari 2018

sekitar 2% lahan di Tepi Barat namun pengkritik mengatakan lahan lain digunakan termasuk untuk pertanian dan memerlukan pengawasan militer. Pemukim Yahudi memilih tinggal di kawasan itu untuk berbagai alasan, mulai dari ekonomi, subsidi dari pemerintah dan juga alasan agama berdasarkan keyakinan bahwa Tuhan menjanjikan lahan untuk umat Yahudi.<sup>5</sup>

### 1. Jerusalem Timur

Pada pertengahan Juni 2017, otoritas Israel di Jerusalem mengesahkan pembangunan gedung pemukiman (semacam rumah susun, tiga lantai) di Jerusalem Timur. Gedung tersebut diperuntukkan pemukim Yahudi di salah satu permukiman Palestina. Ratusan warga Yahudi, bersenjata atau dilindungi oleh pasukan keamanan Israel, sudah menetap di antara 50.000 warga Palestina di permukiman Silwan. Kelompok propemukim telah berusaha memperoleh kembali harta di sana yang dikatakannya pernah menjadi milik orang Yahudi pada Abad XIX.<sup>6</sup>

Langkah Israel memukimkan warga yahudi di tengah-tengah warga Palestina adalah untuk mengubah kondisi demografik di Jerusalem. Namun, rakyat Palestina yang tinggal di dekat lokasi tersebut (tempat pemukiman yang baru direncanakan dibangun) akan mengajukan banding terhadap otoritas Israel. Wilayah tersebut sebelumnya dikelola oleh satu badan pemerintah Israel, yang lalu menjualnya kepada para pemukim. Pemerintah Israel telah menyetujui

---

<sup>26</sup> Apakah isu permukiman Yahudi bisa diselesaikan dalam konflik Israel-Palestina? dalam [www.bbc.com/indonesia/dunia](http://www.bbc.com/indonesia/dunia) di Akses Tanggal 31 Januari 2018

<sup>28</sup> Mi'raj Islamic News Agency. *Israel Terus Membangun Perumahan Yahudi di Palestina*, dalam [www.mirajnews.com](http://www.mirajnews.com) di Akses Tanggal 10 Februari 2018

rencana pembangunan sekitar 800 unit rumah untuk pemukiman di sekitar Yerusalem Timur dan 600 rumah bagi warga Palestina juga akan dibangun di Beit Safafa, lingkungan Arab yang menguasai garis perang pra-1967 antara Israel dan Yerusalem Barat dan Tepi Barat.<sup>7</sup>

## 2 Tepi Barat

Pemerintah Israel telah mengizinkan pembangunan 284 unit rumah baru di pemukiman Yahudi, di tanah rampasan Tepi Barat yang sedianya akan menjadi wilayah negara Palestina pada masa mendatang. Ini membuktikan bahwa terjadinya lonjakan pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat. Otoritas Israel memberi lampu hijau bagi pembangunan 234 unit rumah perawatan di Elkana, 30 rumah di Beit Arye, dan 20 rumah di Givat Zeev. Selain itu, 179 izin mendirikan bangunan juga dikeluarkan kembali, atau berlaku surut, yang berfungsi untuk melegalkan rumah-rumah yang telah dibangun tanpa izin di pemukiman Ofarim. Sekitar 1.000 pemukim Yahudi, yang setiap harinya dijaga oleh tentara Israel, tinggal di antara 230.000 warga Palestina di Hebron. Kota itu sering kali menjadi titik mula kekerasan.<sup>8</sup>

Jumlah unit perumahan dalam rencana pemukiman Tepi Barat yang melewati salah satu tahapan proses perencanaan (disetujui oleh MOD, persetujuan untuk menyetorkan, menyetorkan, menyetujui validasi, validasi). Dalam kasus di mana sebuah rencana melewati beberapa tahap dalam satu tahun, rencana tersebut hanya dihitung satu kali; ketika rencana yang sama melewati tahap lain dalam tahun

yang berbeda, rencananya juga dihitung pada hitungan tahun yang lain. Tetapi, Yerusalem Timur dikecualikan.

## Resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Pemukiman Ilegal di Palestina

Resolusi ini di kenal dengan Resolusi Desember. Resolusi ini dikeluarkan oleh DK PBB karena banyak negara yang melihat bahwa pemukiman ilegal yang dibangun Israel sudah sangat buruk dan mengancam solusi dua negara. Berikut Resolusi 2334, 23 Desember 2016.<sup>9</sup>

Diadopsi oleh Dewan Keamanan pada pertemuan 7853, pada tanggal 23 Desember 2016 Dewan Keamanan, menegaskan kembali resolusi yang relevan, termasuk resolusi 242 (1967), 338 (1973), 446 (1979), 452 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), 1397 (2002), 1515 (2003), dan 1850 (2008),

Dipandu oleh tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menegaskan kembali, antara lain, tidak dapat diijinkan untuk mengakuisisi wilayah secara paksa,

Menegaskan kembali kewajiban Israel, Kekuatan pendudukan, untuk mematuhi secara teliti dengan kewajiban dan tanggung jawab hukumnya berdasarkan Konvensi Jenewa Keempat sehubungan dengan Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, pada tanggal 12 Agustus 1949, dan mengingat kembali pendapat penasihat yang diberikan pada tanggal 9 Juli 2004 oleh Mahkamah Internasional,

Mengutuk semua tindakan yang bertujuan mengubah komposisi demografi, karakter dan status Wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, termasuk, antara lain, pembangunan dan perluasan

<sup>29</sup> Ibid

<sup>31</sup> Serambi Indonesia. *Israel Segera Bangun Pemukiman Baru di Tepi Barat Wilayah Palestina*, dalam [www.aceh.tribunnews.com](http://www.aceh.tribunnews.com) di Akses Tanggal 11 Februari 2018

<sup>43</sup> United Nation Security Council. *Resolution 2334 (2016)*. S/RES/2334. [www.un.org/en/sc/](http://www.un.org/en/sc/)

permukiman, pemindahan pemukim Israel, penyitaan tanah, pembongkaran rumah dan pemindahan warga sipil Palestina, yang melanggar hukum humaniter internasional dan resolusi yang relevan,

Mengungkapkan keprihatinan serius bahwa melanjutkan kegiatan permukiman Israel sangat membahayakan kelangsungan hidup solusi dua negara berdasarkan garis 1967,

Mengingat kewajiban di bawah Quartet Roadmap, yang didukung oleh resolusi 1515 (2003), untuk pembekuan oleh Israel dari semua aktivitas pemukiman, termasuk "pertumbuhan alami", dan pembongkaran semua pos pemukiman yang didirikan sejak Maret 2001,

Mengingat juga kewajiban di bawah peta jalan Quartet untuk Pasukan Keamanan Otoritas Palestina untuk mempertahankan operasi yang efektif yang bertujuan untuk menghadapi semua pihak yang terlibat dalam teror dan pembongkaran kemampuan teroris, termasuk penyitaan senjata ilegal,

Mengutuk semua tindak kekerasan terhadap warga sipil, termasuk aksi teror, serta semua tindakan provokasi, hasutan dan penghancuran,

Mengulangi visinya tentang sebuah wilayah di mana dua negara demokratis, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dengan damai di dalam batas-batas yang aman dan dikenali,

Menekankan bahwa status quo tidak berkelanjutan dan bahwa langkah-langkah signifikan, sesuai dengan transisi yang dipikirkan oleh kesepakatan sebelumnya, sangat dibutuhkan untuk (i) menstabilkan situasi dan untuk membalikkan kecenderungan negatif di lapangan, yang terus-menerus mengikis dua-Solusi negara dan memperkuat realitas

satu negara, dan (ii) menciptakan kondisi untuk negosiasi status akhir yang sukses dan untuk memajukan solusi dua negara melalui negosiasi dan di lapangan.

### **Faktor Penghambat Implementasi Resolusi DK PBB dalam Menyelesaikan Masalah Pemukiman Ilegal di Palestina**

Faktor penghambat resolusi implementasi DK PBB mengenai permasalahan pemukiman ilegal di Palestina adalah sebagai berikut:

#### **1. Faktor Klaim Wilayah**

Israel menduduki wilayah tersebut karena dianggap sebagai wilayah yang dijanjikan oleh leluhur atau menurut kepercayaan dalam Al-kitab orang-orang Yahudi. Sedangkan Palestina adalah warga negara yang pertama menduduki wilayah tersebut, sebelum Israel datang dan merebut tanah tinggal mereka. Pada faktor ini merupakan faktor rumit dalam membahas kasus pemukiman ilegal di Palestina, terlebih jika membawa isu agama atau kepercayaan.

#### **2. Sikap Pertentangan Israel**

Israel terus memperkeruh suasana menjelang pembicaraan damai dengan terus merencanakan membangun pemukiman di wilayah pendudukan. Sikap Israel yang terus membantah kritikan dan menentang Resolusi DK PBB menggambarkan tindakan Israel sebagai langkah kontra-produktif yang merumitkan suasana pembicaraan damai.

Berikut reaksi Israel atas resolusi DK PBB terkait pembangunan pemukiman ilegal Yahudi:<sup>10</sup>

##### **1. Menarik Duta Besar**

PM Netanyahu dilaporkan telah memanggil pulang duta besar Israel di

---

<sup>57</sup> Ekspresi Murka Israel atas Kecaman DK PBB dan Sikap AS, dalam <http://global.liputan6.com/read> di Akses Tanggal 10 Maret 2018.

Selandia Baru dan Senegal untuk berkonsultasi terkait resolusi DK PBB itu. Kedua negara itu termasuk pihak yang menggagas lahirnya keputusan tersebut. Sementara itu, juru bicara Netanyahu, David Keys, menjelaskan, pihaknya telah meminta agar rencana kunjungan menteri luar negeri Senegal ke Israel beberapa waktu yang lalu telah dibatalkan. Ternyata kemarahan Israel juga berimbas pada urusan bantuan. PM Netanyahu dilaporkan telah memerintahkan agar seluruh bantuan ke Senegal dibatalkan

#### 2. Stop pendanaan ke PBB

Israel tak berdiam diri setelah "dihajar" resolusi DK PBB yang memerintahkan agar dihentikannya pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. PM Netanyahu dikabarkan telah memerintahkan agar negaranya menarik pendanaan terhadap lima lembaga PBB. Berbicara melalui pidato yang tayang di televisi, PM Israel itu menyampaikan bahwa pemerintahnya saat ini menahan hampir US\$ 8 juta dana bagi sejumlah badan PBB. Namun ia enggan menyebut nama lembaga-lembaga tersebut. Netanyahu juga mengatakan bahwa masih ada langkah yang akan dilakukannya. Lagi-lagi ia tak bersedia menjelaskannya.

#### 3. Memanggil Kedutaan AS

PM Netanyahu dilaporkan telah memanggil Dubes AS untuk Israel, Daniel Shapiro untuk membahas kebijakan Negeri Paman Sam tersebut. Belum ada penjelasan kapan tepatnya pertemuan keduanya digelar. Baik Kementerian Luar Negeri AS maupun kantor PM Israel tidak memberikan konfirmasi apapun. Selain memanggil dubes AS, Israel juga memanggil 14 perwakilan asing, beberapa menyebutnya 10 lainnya. Namun beberapa laporan mengatakan sejumlah diplomat tidak memenuhi panggilan tersebut. Netanyahu sendiri sudah

menegaskan, pihaknya tidak akan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB. "Israel menolak resolusi PBB anti-Israel yang memalukan ini, kami tidak akan mematuhi hasilnya," kata PM Israel seperti dikutip dari *BBC*.

#### 3. Dualisme Kebijakan AS

AS sebagai pemegang hak veto DK PBB, membuat kebijakan ganda, yakni pada saat pemerintahan Obama akan berakhir, AS abstain dalam memberikan hak vetonya untuk perundingan damai antara kedua belah pihak. Tetapi, saat Donald J. Trump terpilih sebagai presiden, AS membuat kebijakan bahwa Yerusalem sebagai ibukota Israel dan berencana memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Hubungan Amerika Serikat (AS) dan sekutu terdekatnya di Timur Tengah, [Israel](#), jatuh ke titik terendah pada masa pemerintahan Barack Obama. Selama delapan tahun terakhir pula, Obama dan PM Benjamin Netanyahu mempertontonkan sikap berseberangan dalam sejumlah isu penting. Dalam sejumlah kesempatan, orang nomor satu di Negeri Paman Sam itu bahkan membuat Netanyahu geram.

#### 4. Kebijakan AS yang Menjauhkan Solusi Damai

Kebijakan AS mengenai Yerusalem memicu pertentangan dari beberapa negara yang pro bahwa Yerusalem nantinya merupakan wilayah Palestina. Hal ini merupakan pertentangan secara terang-terangan terhadap Resolusi desember yang dikeluarkan DK PBB tahun 2016.

Semasa kampanye, Trump berjanji, kelak ia akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dengan memindahkan Kedutaan Besar AS yang saat ini berada di Tel Aviv. Hal serupa sempat ditegaskan Trump ketika ia dikunjungi Netanyahu pada September 2016 lalu. Tentu, hal ini

dikhawatirkan banyak pihak akan mengancam kesepakatan damai kedua negara. Salah satu upaya untuk memuluskan keinginan tersebut, Trump menunjuk penasihat kampanyenya, David Friedman sebagai Duta Besar AS untuk Israel. Penunjukan Friedman dinilai akan sukses mengingat Senat dikuasai oleh Partai Republik. Sosok Friedman dikenal sebagai pendukung kebijakan pengakuan Yerusalem. Ia juga setuju dengan rencana pembangunan pemukiman Israel.

Status Yerusalem sebagai ibu kota tak hanya diakui oleh Israel, namun juga Palestina. Berdasarkan Jerusalem Embassy Act of 1995, produk hukum yang disahkan pada 23 Oktober 1995, pemerintah AS harus memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem, namun tuntutan ini berhasil "dihindari" setiap enam bulan sejak diresmikan. Mulai dari Presiden Bill Clinton, Bush Jr, hingga Barack Obama, semuanya menolak untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem. Pertimbangan mereka, keamanan nasional AS.

### **5. Meningkatnya Pembangunan Ilegal**

Pembangunan pemukiman Israel yang kian meningkat setelah dikeluarkannya Resolusi Desember menyebabkan gagalnya pembentukan negara Palestina yang bebas dari pendudukan Israel.

Zionis Israel telah merampas sekitar 2.500 hektar tanah Palestina, menghancurkan 500 bangunan dan membangun delapan unit pemukiman Yahudi baru pada tahun 2017, menurut Pusat Penelitian Tanah Palestina (LRC). Menurut laporan pusat tersebut, Israel menyita tanah Palestina dengan "tujuan militer" dan "tujuan untuk membangun unit pemukiman ilegal Yahudi" di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Menurut lembaga hukum Israel dan Palestina, kegiatan pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur meningkat tiga kali pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Gerakan Peace Now juga mengumumkan bahwa pemerintah Israel menyetujui pembangunan 1.982 rumah pada tahun 2015, 2.629 rumah pada tahun 2016 dan angka ini meningkat menjadi 6.500 pada tahun 2017. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Israel, Yoav Galant, pada tanggal 24 Desember mengumumkan rencana untuk membangun 300.000 rumah baru di Yerusalem Timur atas nama "perumahan di tanah Yerusalem yang bersatu, ibukota Israel".<sup>11</sup>

### **6. Barikade dan Kerusuhan**

Barikade dan kerusuhan terjadi di Palestina akibat pertentangan mengenai pemukiman ilegal oleh demonstran, baik yang datang dari luar wilayah maupun pemukim Palestina.

Pusat Penelitian Tanah Palestina (LRC) mencatat bahwa adanya 900 insiden kekerasan dan serangan pasukan Israel di Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur. Ini hanya dari satu titik, bisa dibayangkan jika dikumpulkan semua insiden kekerasan yang terjadi di seluruh bumi Palestina. Tetapi, hal ini bukanlah hal yang baru, mengingat media massa selalu mengekspos apa yang terjadi di bumi Palestina, dan kekejaman Yahudi Israel terhadap Palestina.

### **KESIMPULAN**

Dewan Keamanan PBB merupakan suatu organ yang berperan penting dalam menyelesaikan konflik internasional atau bahkan sengketa internasional. Kadangkala dewan keamanan PBB telah melakukan upaya

---

<sup>64</sup> [www.peacenow.org](http://www.peacenow.org) di Akses Tanggal 11 Maret 2018

yang sangat baik dalam menjalankan fungsinya, tetapi pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang telah menyebabkan ketidakefektifan dari fungsi dewan keamanan itu sendiri.

Beberapa poin penting mengenai faktor penghambat implementasi resolusi DK PBB terhadap permasalahan pemukiman ilegal di Palestina seperti yang dijelaskan pada Bab keempat mencerminkan bahwa sulitnya menciptakan perdamaian di dunia, terlebih jika masing-masing kubu memiliki kepentingan yang lebih diutamakan daripada meringankan kepala dan bertoleransi untuk menciptakan perdamaian.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal:

Jutta Joachim, Bertjan Verbeek, 2004. *International Organizations and Policy Implementation: Pieces of the Puzzle*. Paper presented to the workshop on 'Policy implementation by international organizations' during the Joint Sessions of Workshop of the European Consortium of Political Research, Uppsala, Sweden.

Rahmatullah, 2015. *Peran Amerika Serikat dalam Menciptakan Perdamaian dan Penyelesaian Konflik Israel dan Palestina*. Jurnal Ilmiah WIDYA Volume 3 Nomor 1 Januari-April 2015. ISSN 2337-6686.

Simela Victor Muhamad, 2009. *Perundingan Perdamaian Palestina-Israel*. Jurnal Info Singkat Hubungan Internasional Vol.V, No. 15/P3DI/Agustus/2013 Sekretariat Jenderal DPR RI. [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). ISSN 2088-2351.

Sumiati Beddu, 2014. *Langkah Sepihak Israel dan Kritik Internasional terhadap Rencana Pemukiman Yahudi di Palestina*. Jurnal Hukum Internasional: Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin Volume I Nomor 3 Maret 2014. ISSN: 2338-3577.

##### Buku:

Al-Ghadiry, Fawzy, 2010. *SEJARAH PALESTINA Asal Muasal Konflik Palestina Israel*. Yogyakarta: Bookmarks.

Boernama. 2003. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T Alumni

Budiarjo, Miriam, 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi: Cetakan Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

M. Tafsir M.A. Cet. Ke I, 2015. *Resolusi Konflik*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

##### Website:

*Apakah isu permukiman Yahudi bisa diselesaikan dalam konflik Israel-Palestina?* dalam

[www.bbc.com/indonesia/dunia](http://www.bbc.com/indonesia/dunia) di Akses Tanggal 31 Januari 2018

*Beda Sikap Obama dan Donald Trump Soal Israel*, dalam <http://global.liputan6.com/read> di Akses Tanggal 10 Maret 2018

Carissa Paramita. *Netanyahu Tegaskan Sikapnya atas Konflik Timur Tengah, dalam DW*, <http://www.dw.de/> di Akses Tanggal 14 Februari 2018